

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi yang sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana. Dengan demikian, fungsi utama sektor perbankan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan dalam konteks bagaimana menjadikan uang efektif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi (*how to make money effective and efficient to increase economic value*) (Muhammad, 2011: 1).

Secara filosofis bank syari'ah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia islam dewasa ini. Suatu hal yang sangat menggembirakan bahwa belakangan ini para ekonom muslim telah mencurahkan perhatian besar guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika islam. Upaya ini dilakukan dalam upaya untuk membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan.

Kegiatan operasional perbankan syari'ah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 melalui pendirian PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (PT BMI). Hal ini didasarkan pada Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 dan

diperbaharui lagi pada tahun 2008 dengan lahirnya Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pertimbangan perubahan undang-undang tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tantangan sistem keuangan yang semakin maju dan kompleks, dan mempersiapkan infrastruktur memasuki era globalisasi. Jadi, adopsi perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional bukanlah semata-mata mengakomodasi kepentingan penduduk Indonesia yang kebetulan sebagian besar muslim. Namun lebih kepada adanya faktor keunggulan atau manfaat lebih dari perbankan syariah dalam menjembatani ekonomi (Muhammad, 2011: 11).

Dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 5 Ayat 1 yang diperbaharui dengan UU No. 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa “menurut jenisnya, bank terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat”. Bank Perkreditan Rakyat yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU No. 7 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 3). Adapun yang dimaksud dengan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) adalah BPR biasa yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip ekonomi (syariat) Islam terutama bagi hasil.

Berdirinya BPRS dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi Indonesia yang tengah mengalami restrukturisasi ekonomi. Restrukturisasi perekonomian di Indonesia itu terwujud dalam berbagai kebijakan, baik di bidang keuangan, moneter, termasuk dalam bidang perbankan. Selain itu, berdirinya BPRS itu dilatarbelakangi pula oleh adanya peluang bagi pengembangan Bank Islam dalam

undang-undang perbankan, yang membolehkan menggunakan prinsip bagi hasil (H. A. Djazuli dan Yadi Janwari, 2002: 108)

PT. BPRS PNM Al Ma'soem merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah yang berada di jalan Raya Rancaekek No.1 Bandung. BPRS PNM Al Ma'soem melayani jasa keuangan berupa simpanan dan pembiayaan yang berdasarkan prinsip syari'ah. Sumber dana yang dikelola oleh PT. BPRS PNM Al Ma'soem berasal dari dana sendiri serta dana pihak ketiga.

Kebutuhan akan pemasaran tidak dapat di elakkan karena perkembangan pasar dan persaingan yang semakin berat. Pemasaran dibutuhkan tidak hanya oleh perusahaan-perusahaan tetapi dibutuhkan juga oleh lembaga keuangan misalnya lembaga keuangan mikro syari'ah pada PT. BPRS PNM Al Ma'soem dalam hal pengembangan produk pembiayaan musyarakah.

PT. BPRS PNM Al Ma'soem mempunyai kegiatan yang hampir sama dengan lembaga keuangan syari'ah yang lainnya, yaitu *funding* dan *financing*. Salah satu kegiatan dari *financing* adalah musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama. Konsep musyarakah dikembangkan ke dalam bentuk-bentuk kerjasama dalam suatu proyek tertentu. Konsep ini dikembangkan dengan berdasarkan prinsip bagi hasil atau dikenal dengan istilah *profit and loss sharing* (PLS) di lembaga keuangan syari'ah (Atang, 2012: 106).

Dalam pembiayaan musyarakah, nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak seperti 65%:35%, 55%:45%,

dan bukan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu seperti sepuluh juta atau seratus juta.

Adapun yang menjadi titik tolak permasalahannya adalah penetapan bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah di BPRS PNM Al Ma'soem yaitu dengan besaran keuntungan tetap (flat) yang ditetapkan diawal. Padahal keuntungan yang didapatkan belum diketahui jumlahnya. Pembiayaan musyarakah termasuk ke dalam *Natural Uncertainty Contract* atau kontrak yang tidak memiliki kepastian pendapatan, hal ini disebabkan dengan kondisi usaha di masa yang akan datang tidak dapat di pastikan akan selalu mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan penetapan bagi hasil dalam pembiayaan dengan akad musyarakah yang ada di BPRS PNM Al Ma'soem dengan penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN MODAL KERJA DENGAN AKAD MUSYARAKAH DI BPRS PNM AL MA'SOEM.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan pada latar belakang diatas, untuk mengetahui penetapan bagi hasil pada produk pembiayaan musyarakah di BPRS PNM Al Ma'soem, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan bagi hasil dalam pembiayaan modal kerja dengan akad musyarakah yang diterapkan di BPRS PNM Al Ma'soem?

2. Bagaimana kesesuaian Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah terhadap pelaksanaan bagi hasil dalam pembiayaan modal kerja dengan akad musyarakah di BPRS PNM Al Ma'soem?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penetapan bagi hasil dalam pembiayaan modal kerja dengan akad musyarakah yang diterapkan di BPRS PNM Al Ma'soem.
2. Untuk mengetahui kesesuaian Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah terhadap pelaksanaan bagi hasil dalam pembiayaan modal kerja dengan akad musyarakah di BPRS PNM Al Ma'soem.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini tentunya mempunyai manfaat-manfaat yang sekiranya dapat menambah kegunaan penelitian ini, baik untuk diri peneliti, civitas akademika, dan lembaga keuangan syari'ah.

1. Bagi diri sendiri

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai mekanisme bagi hasil pada pembiayaan musyarakah pada lembaga keuangan syari'ah yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat.

2. Bagi Civitas Akademika

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademika khususnya yang berada di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang memiliki konsentrasi di dalam perbankan

syari'ah sehingga ini menjadi bekal bagi para akademisi di dalam memberikan sikap dan pendapat mengenai praktek di perbankan syari'ah.

### 3. Bagi Lembaga Keuangan Syari'ah

Bagi lembaga keuangan syari'ah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu acuan atau pedoman di dalam meningkatkan produk-produk yang ditawarkan di dalam bank syari'ah dalam penyaluran pembiayaan musyarakah. Sehingga masyarakat dapat lebih tertarik untuk memilih bank syari'ah sebagai solusi dari pada memilih bank konvensional.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk berusaha, termasuk melakukan kegiatan-kegiatan bisnis. Dalam kegiatan bisnis, seseorang dapat merencanakan suatu dengan sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan, namun tidak ada seorangpun yang dapat memastikan hasilnya seratus persen. Suatu usaha, walaupun direncanakan dengan sebaik-baiknya, namun tetap mempunyai resiko untuk gagal. Faktor ketidakpastian adalah faktor yang sudah menjadi *sunnatullah*.

Konsep Bagi hasil, dalam menghadapi ketidakpastian merupakan salah satu prinsip yang sangat mendasar dari ekonomi islam, yang dianggap dapat mendukung aspek keadilan. Keadilan merupakan aspek mendasar dalam perekonomian islam. Dalam hal ini musyarakah merupakan akad kerjasama yang menerapkan sistem bagi hasil di dalam perbankan syari'ah.

### 1. Pengertian Musyarakah

Secara bahasa kata *syirkah* (الشركة) berarti *al-ikhtilath* (percampuran) dan persekutuan. Yang dimaksud dengan percampuran adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan.

Adapun menurut istilah ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly dkk dalam fiqh muamalah, yaitu:

Menurut Ulama Hanafiah

عَقْدُ بَيْنَ الْمُشَارِكَيْنِ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّابِحِ

Artinya : “Akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan”.

Menurut Ulama Malikiyah

إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ لَهُمَا فِي أَنْفُسِهِمَا فِي مَالٍ لَّهُمَا

Artinya : “Izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka”.

Jika diperhatikan dari definisi yang disebutkan di atas maka hakikat dari *musyarakah* itu ialah bentuk suatu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam rangka menjalankan suatu usaha yang mana keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah dan kerugiannya ditanggung secara bersama sesuai dengan porsi modal masing-masing.

*Musyarakah* memiliki kedudukan yang kuat dalam islam, karena keberadaannya didasarkan dengan al-Qur'an, Hadits, serta Ijma ulama. Sehingga menjadi acuan di dalam menjalankan aktifitas kehidupan sehari-hari.

## 2. Landasan Hukum

Landasan syar'i dalam *musyarakah* terdapat dalam Al-Quran dan Hadits. Ayat yang dapat dijadikan rujukan mengenai transaksi *musyarakah* ialah Qs. An-Nissa ayat 12:

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ.....

Artinya :“Maka mereka berserikat pada sepertiga” (Qs An-Nissa 4:12)

Dalam surat Saad ayat 24:

وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ.....

Artinya :“Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikitlah mereka ini” (Qs. Shaad 38: 24) (Depag RI, 2008:454 ).

Yang dimaksud dengan kata *al khulatha* dalam ayat ini adalah: mereka yang berserikat.

Dan dalam As Sunnah, Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman:

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. ( رواه أبو داود عن أبي هريرة )

Artinya : aku (Allah) adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat. Selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianat pada temanya, apabila berkhianat maka aku (Allah) keluar dari mereka (HR. Abu Daud dari Abu Hurairah) (Sabiq, 1995: 174).



Dalam kaidah ushul fiqih disebutkan:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*Hukum pokok (asal) dari transaksi muamalah ialah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*

Berdasarkan dalil yang diuraikan di atas, maka secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan musyarakah dalam usaha diperbolehkan dalam islam, karena dasar hukumnya telah jelas dan tegas.

Landasan hukum positif tentang musyarakah ini diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 dengan aturan pelaksana Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999, pasal 28 butir b.2.b. juga terdapat dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000. Pembiayaan musyarakah disahkan pada Februari 1996 dan sudah mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1998.

### 3. Syarat dan Rukun Musyarakah

Rukun musyarakah adalah sesuatu yang harus ada ketika musyarakah itu berlangsung. Mengenai rukun musyarakah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun musyarakah ada dua yaitu ijab dan qabul sebab ijab dan qabul yang menentukan adanya musyarakah. Adapun menurut Abdurrahman al-jaziri rukun musyarakah meliputi dua orang yang berserikat, *shigat*, dan objek akad *musyarakah* baik itu berupa harta maupun kerja. Dan menurut jumhur ulama rukun *musyarakah* sama dengan apa yang dikemukakan oleh al-jaziri tersebut.

Adapun syarat *musyarakah* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakannya *musyarakah*. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi menjadi batal.

Menurut Hanafiah syarat-syarat *musyarakah* terbagi menjadi tiga bagian :

- a) Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk *musyarakah* baik harta, maupun lainnya. Dalam hal ini, terdapat dua syarat: pertama, berkaitan dengan benda yang diakadkan harus berupa benda yang dapat diterima sebagai perwakilan. Kedua, berkaitan dengan keuntungan, pembagiannya harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setengah, dan sepertiga.
- b) Syarat yang terkait dengan harta (*maal*). Dalam hal ini ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama adalah modal yang dijadikan objek akad *musyarakah* adalah dari alat pembayaran yang sah (*nuqud*) seperti riyal, rupiah, dan dollar. Kedua, adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda.
- c) Syarat yang terkait dengan syirkah *mufawwadhah* yaitu;
  - (1) Modal pokok harus sama
  - (2) Orang yang *bersyirkah* yaitu ahli kafalah
  - (3) Objek akad disyaratkan secara umum, yaitu semua macam jual beli atau perdagangan (Ghazali, Ihsan dan Shidiq, 2008: 130).

Selain syarat-syarat diatas ada syarat lain yang perlu dipenuhi dalam *musyarakah*. Menurut Idris Ahmad, syarat tersebut meliputi :

- (1) Mengungkapkan kata yang menunjukkan izin anggota yang berserikat kepada hak yang akan mengendalikan harta tersebut.

(2) Anggota serikat saling mempercayai. Sebab, masing-masing mereka merupakan wakil yang lainnya.

(3) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik bentuk mata uang atau yang lainnya (Suhendi, 2013: 128).

#### 4. Macam-macam Syirkah

Para ulama fiqh membagi syirkah menjadi dua macam :

- a. *Syirkah amlak* (Perserikatan dalam kepemilikan)
- b. *Syirkah al-Uqud* (Perserikatan berdasarkan akad)

##### 1) *Syirkah Amlak*

Menurut sayyid sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah amlak* adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik bersifat *ikhtari* atau *jabari*. Artinya, barang tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa dahului oleh akad. Hak kepemilikan tanpa akad itu dapat disebabkan oleh dua sebab :

- a) *Ikhtari*, atau disebut (*syirkah amlak ikhtari*) yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang sepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain maka benda-benda ini menjadi harta serikat bersama bagi mereka berdua.
- b) *Jabari* (*syirkah amlak jabari*) yaitu perserikatan yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat, artinya hak milik bagi mereka berdua atau lebih tanpa dikehendaki oleh mereka. Seperti harta warisan yang mereka terima dari bapaknya yang telah wafat. Harta warisan ini menjadi harta

bersama bagi mereka yang memiliki hak warisan. ( Ghazali, Ihsan dan Shidiq, 2010: 131)

## 2) *Syirkah 'Uqud*

*Syirkah 'uqud* adalah dua pihak atau lebih membuat perjanjian atau kontrak untuk menggabungkan harta guna melakukan usaha/bisnis, dan hasilnya dibagi baik berupa laba maupun rugi. Dalam syirkah ini, masing-masing syarik menyediakan dana/barang untuk dijadikan modal usaha yang hasilnya dibagi bersama. Apabila usaha merugi, maka kerugian ditanggung bersama secara proporsional. Sebaliknya, apabila usaha mendatangkan keuntungan, maka keuntungan dibagi bersama secara proporsional atau sesuai perjanjian yang disepakati dalam akta (Maulana dan Jaih Mubarak, 2012: 30).

Dalam *syirkah uqud*, Ulama Hanafiah menetapkan syarat-syarat syirkah yang berlaku umum (termasuk syirkah amlak dan syirkah uqud), dan syarat-syarat khusus bagi syirkah uqud. Syarat-syarat syirkah uqud dalam pandangan ulama hanafiah berisi tentang wakalah dan pembagian keuntungan.

Pertama, *qabaliyat al-wakalah*; yaitu bahwa dalam *syirkah uqud* terkandung akad wakalah, sebab *syirkah uqud* bertujuan untuk melakukan bisnis yang tidak mungkin dilakukan kecuali jika terdapat akad “kuasa” dari masing-masing pihak *syarik*. Oleh karena itu, semua *syarik* harus memiliki kecakapan hukum untuk memberi dan menerima kuasa, dan perbuatan hukum yang boleh dilakukan dalam *syirkah uqud* hanyalah perbuatan hukum yang dapat di kuasakan.

Kedua, keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah uqud* harus ditentukan nisbahnya bagi masing-masing *syarik* (tidak ditentukan jumlahnya), apabila dalam

*syirkah uqud* tidak ditentukan nisbah keuntungan bagi masing-masing *syarik*, maka *syirkah* tersebut termasuk *fasid*, karena laba/keuntungan dalam *syirkah uqud* adalah tujuan akad.

Ketiga, bagian keuntungan bagi masing-masing *syarik* tidak boleh dinyatakan dalam jumlah tertentu yang pasti (seperti seratus juta atau satu miliar), tetapi dinyatakan dalam “nisbah” misalnya 60:40 atau 55:45. Apabila pembagian keuntungan ditetapkan dengan jumlah yang pasti (*mu'ayyan*) bukan nisbahnya, maka *syirkah* tersebut termasuk *syirkah* yang fasid (Hasanudin dan Jaih Mubarak, 2012: 31).

Ulama Hanafiah membagi *syirkah* ini menjadi 5 (lima) jenis, yakni;

- a. *Syirkah Al-'Inan* adalah penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain.
- b. *Syirkah Mufāwadah* adalah perserikatan di mana modal semua pihak dan bentuk kerjasama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata.
- c. *Syirkah abdan*, yaitu perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Artinya, perserikatan dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan.
- d. *Syirkah Wujuh*, yaitu perserikatan tanpa modal, artinya dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, yang terjadi adalah hanya berpegang kepada nama baik dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka.

- e. *Syirkah Mudharabah*, yaitu persetujuan antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun kerugian ditanggung oleh pemilik modal saja.

Menurut Hanabilah, mudharabah dapat dikatakan sebagai syirkah jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- Pihak pihak yang berserikat cakap dalam bertindak sebagai wakil
- Modalnya berbentuk uang tunai
- Jumlah modal jelas
- Diserahkan langsung kepada pekerja setelah akad disetujui
- Pembagian keuntungan diambil dari hasil perserikatan itu, bukan dari harta yang lain (Ghazaly, Ihsan dan Shidiq, 2010: 132-134).

Dari sekian banyak jenis *musyarakah* tersebut diatas hanya *syirkah 'inan* yang paling tepat dan dapat diaplikasikan dalam perbankan syari'ah. Dimana, bank dan nasabah keduanya memiliki modal. Modal bank dan modal nasabah digunakan oleh pengelola sebagai modal untuk mengerjakan proyek. Pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari proyek dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama. (Djambatan, 2001: 184).

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Guna memperlancar dan mempermudah penulisan agar lebih sistematis diperlukan langkah-langkah dalam penelitian, adapun langkah-langkah yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan tentang penetapan bagi hasil pada produk pembiayaan musyarakah di BPRS PNM Al Ma'soem.

## **2. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Ada beberapa sumber penting dalam rangka memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan diatas. Adapun yang menjadi sumber penelitian yaitu:

### **a. Sumber data primer**

Sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah orang yang merespon dan menjawab atau merespon pertanyaan peneliti yang berupa pertanyaan lisan dan Tulisan. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah kepala cabang beserta staff karyawan BPRS PNM al-Masem dan DPS (Dewan Pengawas Syari'ah).

### **b. Sumber data sekunder**

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah seperti referensi buku, jurnal atau makalah, skripsi, artikel, catatan perkuliahan, internet, dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

## **3. Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data kualitatif, yang diklasifikasikan dalam bentuk :

- a. Data tentang pemahaman tentang musyarakah menurut perumus pembiayaan musyarakah.
- b. Data tentang pembagian bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah di BPRS PNM Al Ma'soem.
- c. Data tentang tinjauan fiqih muamalah dan fatwa DSN MUI terhadap penetapan bagi hasil secara flat dengan besaran keuntungan diawal pada di BPRS PNM Al Ma'soem.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara

Merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab langsung dengan pihak BPRS PNM Al Ma'soem.

- b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan cara mencari data dari buku-buku, artikel-artikel, kitab dan sumber-sumber tertulis lainnya. Hasil dari studi kepustakaan ini dapat dijadikan landasan atau sumber data mengenai konsep, teori dan praktik bagi hasil dengan akad musyarakah di di BPRS PNM Al Ma'soem.

#### **5. Analisis Data**



Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif melalui teknik campuran analisis deduktif. Dalam pelaksanaannya analisis data dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sebagai data primer maupun sumber data skunder;
- b. Mengklasifikasi data kedalam satuan-satuan sesuai dengan variabel masalah penelitian;
- c. Menghubungkan data antara teori dengan praktik sebagaimana disusun dalam kerangka pemikiran;
- d. Menganalisis seluruh data secara deduktif dan induktif, sehingga diperoleh kesimpulan.

